



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2016). *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Bawono, Icu Rangga. 2003. "Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju *Good Governance*." *Jurnal Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto*.
- Boonperm, Haughton & R.Khandker. (2013) "Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending" *Journal of Asian Economics*.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Chandoevrit dan Ashakul. (2008) "The impact of the Village Fund of Rural Households" *Journal of Asian Economics*.
- Cresswell, John. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cresswell, John. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Los Angeles: SAGE Publication
- Deri. 2017. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 121–32.
- Fitra, Amanda Aidil. 2016. "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." Universitas Gadjah Mada.
- Fitriati.(2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Hendi Sandi Putra. 2017. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri." *Jurnal Politik Muda* 6(2): 110–19.
- Hennink, Monique, Inge Hutter dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. Los Angeles: SAGE Publication
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal. Palu: Universitas Tadulako.



- Juliarso,A, Hidayat.S (2016). Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara)." *Jurnal Citizen* 1(1).
- Kementerian Keuangan. (2017). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluram Dana Desa Tahun 2017. Presentation, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Laporan Tahunan 2017, Jakarta
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). PEDOMAN UMUM GOOD PUBLIC GOVERNANCE INDONESIA.
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*.
- Liu, Q and Lu, Z. 2007. Corporate Governance And Earnings Management In The Chinese Listed Companies: A Tunneling Perspective. *Journal of Corporate Finance*, 13(5): 881-906.
- Madea, Yolanda, Alden Laloma, and Very Y. Londa. (2017). "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 3(46).
- Miftahuddin, (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), Universitas Islam Indonesia.
- Nyimas Latifah Letty Aziz. (2016) "*The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund*" *Journal of Asian Economics*
- Paluku Kazimoto. (2014). *Assessment Of Factors Affecting Small Businesses' Performance In Tanzania*. Faculty Of Business, University Of Arusha.
- Rahaditama, Muhammad Williams. (2016). Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Kasus dana 5 Desa di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar). Thesis.
- Rahayu, Depi. (2017). "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Economics Development Analysis Journal*.
- Riskasari. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Jurnal. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi.
- Sofyani, H.. (2017). Giri Loji Desa: Sebuah Studi Fenomenologi atas Konsep Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmia Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.2, No.2, Hal:113-128. Desember 2017.
- Suryaningrum, F. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa 2015 (Studi Kasus Di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan), University of Muhammadiyah Malang.



- Thomas. (2013), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung , e-Jurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1,
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10 (1), 27-46.
- Wijayanti, Nasiwan. (2018) Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa (Studo Kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten), e-Jurnal Pemerintah Publik Volume 7, Nomor 4.
- Yin, Rober K. 2014. *Case Study Research: design and Methods*. Edisi ke-5. Los Angles: SAGE Publication.

### Media

- Kemendagri. 2018. "Perkembangan Paradigma *Good Governance*."Kemendagri. <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance> (April 25, 2018).
- Kementerian Keuangan. (2017). *Dana Desa*. <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa.<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa>.
- Media Kompas : <https://indeks.kompas.com/tag/desa-percontohan>
- MediaRepublika : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/22/pgz73j335-kepala-desa-tersandung-masalah-dana-desa>

### Peraturan-peraturan

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, tentang tata cara pengalokasian , penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Kebijakan dana desa tahun 2016 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa